

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung :

Rektor Universitas Komputer Indonesia
Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto

Penanggung Jawab :

Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia
Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA

Pengarah :

Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.
Drs. Manap Solihat, M.Si.

Pemimpin Redaksi :

Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si.

Anggota Redaksi :

Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si.
Rino Adibowo, S.IP., M.I.Pol.
Sangra Juliano, S.I.Kom., M.I.Kom
Sylvia OctaPutri, S.IP.

Tata Usaha :

RatnaWidiastuti, A.Md

Terima Kasih Kepada Mitra Bestari

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA
Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra.

KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu (JIPSi) adalah Jurnal yang memuat artikel ilmiah tentang gagasan konseptual, kajian teori, aplikasi teori dan hasil riset. JIPSi ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi terkini dalam bidang ilmu politik dan ilmu komunikasi. JIPSi diterbitkan secara berkala oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia (FISIP Unikom) setiap enam bulan sekali.

JIPSi menerima artikel dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Artikel yang dikirimkan harus orisinal dan belum atau sedang dipublikasikan oleh Jurnal lain.

Artikel yang dimuat dalam JIPSi telah melalui proses seleksi mitra bestari atau editor dengan memperhatikan persyaratan baku publikasi Jurnal, metodologi penelitian dan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik dan ilmu komunikasi. Naskah dikirimkan dengan format Ms.Word melalui email: Redaksi.Jipsi@gmail.com atau mengirimkan *hard copy* dilengkapi dengan *soft copy/CDRW* ke alamat redaksi JIPSI.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi redaksi :

REDAKSI JIPSi

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi

Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia

Kampus II, Lt.I

Jalan Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132

Telp. (022) 2533676

Email: Redaksi.Jipsi@gmail.com

Website: <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>

Twitter: @RedaksiJIPSI

DAFTAR ISI

MENDEKATI HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN PENDEKATAN SEMIOTIK <i>Musa Maliki, Asrudin Azwar</i>	1
KOMUNIKASI DAN GENDER : PERBANDINGAN GAYA KOMUNIKASI DALAM BUDAYA MASKULIN DAN FEMINIM <i>Sangra Juliano Prakasa</i>	19
KERJASAMA PEMBANGUNAN INDONESIA DAN UNI EROPA: SUATU ANALISIS TEORI LIBERALISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL <i>Adityo Darmawan Sudagung, Arry Bainus, Abdul Musyawardi Chalid</i>	31
SEKURITISASI PANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 <i>Dewi Triwahyuni, Sylvia Octa Putri</i>	43
PERAN DPRD JAWA BARAT DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PUBLIK <i>Dina</i>	57
MENILIK KEMBALI MAKNA REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DALAM KONTEKS AKTUALISASI SEMANGAT PELAYANAN PUBLIK PRIMA <i>Dadi Junaedi Iskandar</i>	69
KOMUNIKASI VERBAL ANGGOTA JAMAAH TABLIGH KOTA BANDUNG <i>Inggar Prayoga</i>	91
PEMODELAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA CIMAHI <i>Titin Rohayatin, Agustina Setiawan</i>	105
PENDEKATAN KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA TENTANG PENERAPAN ATURAN PERDA K-3 DAN KEBIASAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG DALAM MEMBUANG SAMPAH <i>Anisti</i>	121
EVALUASI PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN PASAR DI KOTA BANJARMASIN <i>Muhammad Riduansyah Syafari</i>	131

PENDEKATAN KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA TENTANG PENERAPAN ATURAN PERDA K-3 DAN KEBIASAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG DALAM MEMBUANG SAMPAH

Anisti

Jurusan Broadcasting

Akademi Komunikasi AKOM BSI Jakarta

Email : anisti@bsi.ac.id

Abstract

This study focuses on the habit of littering is not in place. This phenomenon occurs almost all corners of the country. This is a major factor city government implement the regulation of K-3 about Cleanliness, Neatness and Comfort. Qualitative descriptive study with this constructivist paradigm, using the approach of intercultural communication. Informants purposively determined by 5 people. The research objective to provide an overview of the attitudes of the people of Bandung, the implementation of legislation related to the K-3. The study says that the city government to apply the K-3 have not noticed the psychological aspects of society. Habit is ingrained, littering, of course, can not be stopped by means prontal, but necessary intercultural approach, considering Bandung consisting of multicultural society. Moreover, comfort and beauty of public transportation users are also affected, with the placement and type of litter box that is not accompanied by the provision of city government.

Keywords: intercultural communication, regulation of K-3, Habits Community

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada kebiasaan membuang sampah bukan pada tempatnya. Fenomena ini hampir terjadi diseluruh pelosok tanah air. Hal ini yang menjadi faktor utama pemerintah kota Bandung menerapkan Perda K-3 tentang Kebersihan, Kerapihan dan Kenyamanan. Kajian deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivis ini, menggunakan pendekatan komunikasi antar budaya. Informan ditentukan secara purposive sebanyak 5 orang. Tujuan penelitian untuk memberikan gambaran tentang sikap dan pandangan masyarakat kota Bandung, terkait diterapkannya Perda K-3. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemerintah kota Bandung menerapkan K-3 belum memperhatikan aspek psikologis masyarakat. Kebiasaan yang sudah mendarah daging, membuang sampah sembarangan, tentu saja tidak dapat dihentikan dengan cara prontal, akan tetapi diperlukan pendekatan antar budaya, mengingat Bandung terdiri dari masyarakat multikultur. Selain itu, kenyamanan dan keindahan pengguna angkot juga terganggu, dengan penempatan serta jenis kotak sampah yang tidak disertai ketentuan dari pemerintah kota Bandung.

Kata kunci: komunikasi antar budaya, Perda K-3, Kebiasaan Masyarakat

1. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah kota Bandung menerbitkan aturan tentang ketertiban, kebersihandankenyamanankota,diterapkan melalui penyediaan fasilitas kebersihan seperti tempat atau tong sampah. Mulai dari jalan-jalan protokol hingga kendaraan

roda empat baik kendaraan pribadi maupun transportasi umum diwajibkan menyediakan fasilitas tong sampah. Upaya tersebut sebagai implementasi dari Perda Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan atau K3. Fasilitas tempat sampah di dalam mobil diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf n Perda 11/2005 tentang K3.Perda tersebut

berbunyi setiap kendaraan penumpang orang dan barang diwajibkan melengkapi tempat sampah di dalam mobil.

Penyediaan fasilitas sampah bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan peraturan tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya kebijakan itu dinilai kurang efektif. Secara sosiologis, masyarakat sudah terbiasa membuang sampah sembarang sehingga sulit untuk membiasakan sesuatu secara drastis dan sporadis. Alhasil, tempat-tempat sampah di jalan-jalan protokol sebahagian besar terbengkalai, teronggok layaknya seperti barang rongsokan yang setiap saat bisa saja diambil oleh oknum untuk dijual. Sementara secara psikologis, masyarakat belum terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Mereka membutuhkan waktu untuk menanamkan kesadaran pada diri agar menjaga lingkungan melalui ketertiban, kebersihan dan kenyamanan.

Upaya pemerintah kota Bandung menerapkan aturan Perda Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan atau K3 tidak main-main. Bahkan jika kedapatan kendaraan yang tidak menyediakan tempat sampah akan dikenakan sanksi senilai 250 ribu rupiah. Adanya tempat sampah di dalam mobil diakui sebagai bagian dari perilaku edukasi. Logikanya kalau ada tempat sampah, bisa menahan tidak buang sampah sembarangan ke luar mobil. Ketetapan yang telah diberlakukan sejak 8 Desember 2014 itu, ternyata masih ditanggapi beragam oleh masyarakat. Kontroversi terutama mengenai sanksi yang dinilai terlalu terburu-buru. Seyogyanya sanksi diterapkan secara bertahap karena merubah perilaku masyarakat tidak bisa terjadi secara serempak dan seketika. Realitas yang dikonstruksi oleh masyarakat tentang perda K3 tersebut, menuai banyak kritikan disamping juga pujian karena melihat keseriusan pemerintah kota

Bandung.

2. Metode Penelitian

Metode sebagai cara kerja untuk memudahkan peneliti guna mencapai tujuan. Metode fokus kepada strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis dan waktu dari data yang diperlukan. Metode juga untuk menjembatani pencapaian tujuan. Untuk itu, metode diawali dengan kegiatan pengumpulan data, pengolahan dan analisis. Data penelitian yang sudah dilakukan analisis data, selanjutnya dideskripsikan secara induktif untuk mendapatkan makna dari kondisi alami yang ada. Proses pemaknaan terhadap data, dilakukan dengan interpretasi idiografik (*idiographic interpretation*) (Lincoln dan Denzin, 2009:8).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan paradigma konstruktivis. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Denzin (2009:6) teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Pendekatan kualitatif dimana merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan.

Paradigma yang digunakan yakni konstruktivis. Denzin dan Lincoln (2009:124) tujuan dari penelitian paradigm konstruktivisme diarahkan untuk menghasilkan berbagai pemahaman yang

bersifat rekonstruksi, yang di dalamnya kriteria kaum postivis tradisional tentang validitas internal dan eksternal digantikan oleh sifat layak dipercaya (*trustworthiness*) dan otentisitas (*authenticity*). Sedangkan perspektif yang digunakan adalah perspektif interpretif, melakukan interpretasi terhadap hasil sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif.

Informan dipilih secara *purposive* dimana peneliti secara sengaja memilih orang-orang yang benar-benar dipandang memahami masalah yang diteliti. Adapun informan yang dipilih adalah sopir angkot dan masyarakat pengguna angkot.

3. Pembahasan

Ketetapan pemerintah kota Bandung mengenai ketertiban, kebersihan dan kenyamanan, tidak begitu saja dapat diterima oleh masyarakat. Tanggapan beragam muncul pasca diterapkan aturan menyediakan tong sampah mulai dari sopir dan penumpang. Mereka menilai kebijakan pemerintah kota Bandung sebagai langkah positif demi nyaman dan kebersihan kota. Akan tetapi, mereka mengkritik tentang sanksi yang diberlakukan yang dinilai terlalu tergesa-gesa. Sanksi berupa denda 250 ribu rupiah bagi yang tidak menyediakan tong sampah dan yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Menurut para sopir angkot ini, sanksi semestinya diberlakukan bertahap setelah diterapkannya terlebih dahulu aturan tersebut dalam beberapa waktu tertentu. Masyarakat memerlukan penyesuaian dan pembiasaan agar mereka dapat membiasakan disiplin membuang sampah pada tempatnya.

“da saya mah setuju aja diminta menyediakan tong sampah di angkot, tapi jangan terburu-buru memberikan sanksi atuh, kadang-kadang kita juga nggak tau informasi tentang tong sampah itu. Da meureun buat yang lain bisa ajah langsung didenda tapi untuk sopir angkot berat lah, penghasilannya juga berapa. Demikian

tutur akang salah seorang sopir angkot jurusan Gedebage Stasion Hall”

Pengakuan sopir angkot tersebut mempertegas bahwa pendekatan intra-budaya dan antarbudaya terhadap perilaku masyarakat sangat diperlukan. Pendekatan yang memperhatikan aspek kebiasaan masyarakat yang sampai saat ini sudah mendarah daging sehingga sulit untuk merubah secara drastis. Namun, diberlakukan secara bertahap hingga masyarakat melaksanakan aturan tersebut secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab. Intrabudaya seperti adat istiadat, kebiasaan, nilai dan norma merupakan bagian dari aspek kajian antropologi. Sedangkan kebiasaan wujud dari perilaku masyarakat. Perilaku merupakan bagian dari kajian ilmu antropologi. Sedangkan komunikasi mengkaji “makna” secara utuh atau *meaning full* dari setiap symbol pada proses komunikasi. Antropologi sangat berkaitan dengan ilmu komunikasi karena ilmu komunikasi mencoba untuk mengkaji dan memahami makna atau arti dari perilaku manusia. Perilaku tersebut salah satunya berupa kebiasaan, yakni perilaku seorang individu yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi bagian dari individu tersebut.

Selain menilai terlalu tergesa menerapkan sanksi, penumpang angkot juga menilai bahwa kebijakan menyediakan tong sampah, tidak begitu saja menyelesaikan masalah. Justu pemerintah kota Bandung seyogyanya memperhatikan pula aspek kenyamanan penumpang dengan adanya tong sampah di dalam angkot. Misalnya, mengatur secara teknis seperti jenis tong sampah dan penempatan tong sampah agar seragam dan tidak mengganggu kenyamanan penumpang. Berikut pengakuan salah seorang penumpang ibu Aida.

“kurang nyaman karena posisi tong sampah

yang berhadapan dengan penumpang dan dalam kondisi terbuka. "penempatan tong sampah harus lebih diperhatikan agar tidak mengganggu kenyamanan penumpang, misalnya dekat pintu mobil dan dibuat permanen juga ditutup kalo bisa mah. Sekarang saya lebih memilih duduk di depan daripada dekat tongsampah."

Gambar 1. Tong sampah di dalam Angkutan Umum



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Masyarakat pada dasarnya sangat menyambut baik kebijakan pemerintah kota Bandung menerapkan Perda K3, akan tetapi masyarakat kota Bandung sangat menyayangkan program tersebut tidak diatur secara komprehensif. Kebijakan itu diberlakukan secara merata tanpa adanya kriteria dan ketentuan lainnya. Padahal, seharusnya pemerintah kota Bandung, memperhatikan norma sosial atau aturan-aturan yang ada dimasyarakat yang sifatnya sudah permanen. Aturan yang dibuat sendiri dan dibangun dari lingkungan sehingga menjadi kebiasaan. Untuk itu, membuat mereka mengikuti aturan tersebut setidaknya diperlakukan secara bijak. Misalnya, jenis tong sampah dan posisi penempatan antara angkutan kota atau angkot dengan mobil pribadi tentu saja tidak boleh disamakan. Mobil pribadi justru tidak menjadi persoalan karena tidak menimbulkan masalah baru. Tapi, beda halnya pemberlakuan pada

angkot, hadirnya tong sampah tentu saja akan mengurangi jumlah penumpang dan menyita kenyamanan penumpang akibat tumpukan sampah di depan duduk mereka.

3.1. Pendekatan Antarbudaya pada Komunitas Sopir Angkot

Norma sosial adalah salah satu faktor yang mendorong individu untuk berperilaku tertentu yang dipengaruhi oleh adat istiadat, nilai, emosi, sikap dan lainnya. Perilaku terdiri dari perilaku positif dan negatif. Perilaku positif adalah perilaku yang memang diharapkan karena sesuai dengan aturan dan harapan. Sedangkan perilaku negatif atau menyimpang yakni perilaku yang tidak diharapkan, perilaku yang dinilai salah. Karakteristik dari kebudayaan membentuk pola perilaku. Perilaku komunikasi yang khusus, biasanya tampil dalam konsep subkultur. **Yang dimaksud dengan kebudayaan subkultur adalah** kebudayaan yang hanya berlaku bagi anggota sebuah komunitas dalam satu kebudayaan makro. Meskipun kita semua orang Indonesia, namun setiap individu memiliki perilaku yang berbeda karena mereka mempunyai standar norma dan perilaku rata - rata dan ideal tersendiri yang diterima dikalangan mereka.

Rodger dalam Samovar (2010:31), subkultur adalah suatu kolektifitas orang - orang yang mempunyai kesadaran keanggotaan yang didasarkan pada suatu unit perilaku yang teridentifikasi dengan jelas, yang agak berbeda dengan kebudayaan luas. Tampak bahwa definisi ini mengandung dua pengertian pokok, yakni pengelompokan dan identifikasi sosial. Dua **konsep** tersebut sangat berkaitan erat dengan batas - batas hubungan antar pribadi.

Keanekaragaman subkultur meskipun mereka memiliki satu budaya umum

yang luas. Beberapa diantara mereka menjalankan keyakinan dan praktek yang berbeda. Diantaranya adalah kebiasaan yang dimiliki oleh sekelompok sopir angkot tentu saja berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Secara demografis seperti pendidikan dan penghasilan berbeda dengan masyarakat pengguna kendaraan pribadi. Untuk itu, sangat wajar apabila sopir angkot dan penumpang adalah masyarakat yang paling berkeberatan dan merasa tidak diperlakukan secara tidak adil. Bagi sopir angkot uang senilai 5000 rupiah sangat berarti, dan mereka sangat takut kehilangan penumpang akibat ketidaknyamanan pasca adanya tong sampah di dalam angkot.

Pandangan subkultur atau kelompok masyarakat sopir angkot, sangatlah wajar karena mereka merasa memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan. Pandangan sebagai sebuah hasil persepsi tentang keberatan mereka terhadap cara pemberlakuan perda K3. Persepsi merupakan suatu cara untuk membuat dunia fisik dan sosial menjadi masuk akal. Persepsi merupakan proses seleksi, pengaturan dan penginterpretasian data sensor dengan cara untuk mengerti dunia. Dengan kata lain, persepsi merupakan proses dimana orang-orang mengubah kejadian dan pengalaman eksternal menjadi pemahaman internal yang berarti.

Persepsi sebagian kelompok masyarakat yakni para sopir angkot dan penumpang tentang K3, semestinya dijadikan sebagai tantangan pemerintah kota Bandung untuk mewujudkan lingkungan yang benar-benar nyaman. Masa depan juga akan ditandai oleh tantangan akan perubahan lingkungan. Untuk beberapa orang di dunia, buruknya lingkungan bukanlah teori ilmiah atau prediksi, melainkan suatu kenyataan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, buruknya lingkungan sangat membutuhkan komunikasi intra dan antar budaya yang cakap.

Usaha pemulihan lingkungan melalui pendekatan komunikasi intra budaya, akan berlanjut untuk beberapa lama dan usaha ini akan membutuhkan komunikasi antarbudaya. Salah satu pendekatannya adalah mencoba memahami kebiasaan kelompok masyarakat sopir angkot dan penumpangnya.

Pendekatan antar budaya penting diterapkan dalam upaya mendekati subkultur masyarakat sopir angkot. Selain karena mereka memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, mereka juga berasal dari etnis yang berbeda-beda. Sopir angkot tidak hanya orang asli Bandung tapi juga kebanyakan dari luar kota Bandung. Banyak diantara kelompok sopir angkot itu adalah warga transmigrasi atau perpindahan dari luar kota. Terjadi perpindahan penduduk karena alasan mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Untuk itu, pendekatan antar budaya semestinya dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dalam mendekati subkultur komunitas atau kelompok sopir angkot di kota Bandung.

Samovar (2010:10) dalam bukunya Komunikasi Lintas Budaya menjelaskan bahwa pada saat ini populasi masyarakat dunia meningkat. Dalam banyak kasus, kondisi kehidupan yang tidak dapat dipertahankan lagi dan kurangnya kesempatan ekonomi akan mendorong orang untuk melirik dunia maju. Hal ini tentu dapat mengubah kompleksitas budaya dan sosial di negara tersebut. Dari itu sudut pandang, imigran dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai budaya yang telah lama ada, dimana pada banyak kasus dapat berkembang menjadi rasisme. Namun, dilihat dari sudut pandang yang lain, kedatangan mereka dianggap sebagai sumber pemasukan pemasukan ekonomi negara karena mereka melengkapi tenaga kerja pribumi yang semakin menipis jumlahnya dan mereka juga membayar

pajak, sehingga menopang sistem jaminan sosial.

Beragamnya masyarakat kota Bandung, semestinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah kota agar tidak menerapkan peraturan secara sporadis. Akan tetapi kebijakan yang memperhatikan dan mempertimbangkan budaya masyarakat. Bandung adalah kota yang tidak hanya ditempati oleh asli masyarakat etnis sunda akan tetapi banyak pula para pendatang yang menggantungkan nasibnya dengan bekerja di kota kembang ini. Diantara pekerjaan tersebut adalah sopir angkot. Kelompok sopir angkot yang beragam dan berasal dari seluruh penjuru tanah air. Oleh karena itu, kondisi ini kembali memperkuat bahwa penerapan kebijakan K₃ seharusnya menggunakan pendekatan intra dan antar budaya. Bandung adalah salah satu kotamultikultural karena Bandung salah satu kota tujuan imigrasi.

Parekh (2008:17) dalam bukunya *Rethinking Multiculturalism* menjelaskan bahwa istilah masyarakat multikultural dan multikulturalisme pada umumnya dipergunakan untuk merujuk pada satu masyarakat yang menunjukkan ketiga keanekaragaman yaitu subkultural, keanekaragaman perspektif dan keanekaragaman komunal. Seluruhnya serta keanekaragaman lainnya, satuyang menunjukkan dua terakhir yang lainnya, atau mengacu pada yang ditandai hanya oleh jenis keanekaragaman yang ketiga.

Sementara itu, Sosiolog Parsudi Suparlan, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah idiologi yang mengagungkan perbedaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat.

Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural. Perbedaan itu dapat terwadahi di tempat-tempat umum, tempat kerja dan pasar, dan sistem nasional dalam hal kesetaraan derajat secara politik, hukum, ekonomi, dan sosial.

Sedangkan Spradley dalam bukunya *Metode Etnografi* (2007:15) menitikberatkan multikultural pada proses transaksi pengetahuan dan pengalaman yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk menginterpretasikan pandangan dunia mereka yang berbeda untuk menuju ke arah kebaruan kultur. Kata multikultural menjadi pengertian yang sangat luas (*multi-discursive*), tergantung dari konteks pendefinisian dan manfaat apa yang diharapkan dari pendefinisian tersebut. Yang jelas dalam kebudayaan multikultural setiap individu mempunyai kemampuan berinteraksi dan bertransaksi meskipun latar belakang kultur masing-masing berbeda, karena sifat manusia antara lain; (1) akomodatif, (2) asosiatif, (3) adaptabel, (4) fleksibel, (5) kemauan untuk saling berbagi.

Pendekatan antar budaya tentu saja akan menghindari kemungkinan terjadinya *shock culture* atau geger budaya. Suatu kondisi yang menggambarkan masyarakat “terkejut” kaget terhadap suasana baru atau kondisi yang diluar dugaan masyarakat. Demikian pula penerapan perda K₃ ini, subkultur kelompok masyarakat kota Bandung mengalami geger budaya. Sebagian dari mereka mengaku bahwa pemberitahuan tentang penerapan K₃ tidak diketahui secara langsung dan terkesan mendadak. Bahkan mereka mengakui ada yang tidak mengetahuinya.

Gambar 2. Pengakuan sopir angkot tentang Perda K3



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Beragamnya persepsi kelompok masyarakat yakni sopir angkot dan penumpang angkot, seharusnya menjadi barometer keberhasilan atau penerimaan setelah diberlakukannya Perda tentang ketertiban, kebersihan dan kenyamanan. Meski diakui, pemkot Bandung sangat serius dan berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, salah satunya melalui brosur yang disebar dan dipasang di hampir semua angkutan umum kota Bandung.

Gambar 3. Edaran Walikota tentang Perda K3



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Atribut sosialisasi tentang Perda K3 bukan menjadi satu-satunya cara yang disimpulkan efektif. Namun, pendekatan antar budaya adalah langkah yang paling tepat mensosialisasikannya. Pendekatan dari hati ke hati, sebuah interaksi yang dilakukan secara langsung dengan memperhatikan latar belakang masyarakat. Pendekatan antar budaya mendorong

kita menjadi individu antarbudaya, yaitu individu yang dapat memahami budaya orang lain sehingga hubungan dengan orang lain tetap terbangun meskipun berada dilingkungan berbeda budaya.

Mulyana (2009:233) mengutip konsep manusia antar budaya dari William B Gudykunst dan Young Yun Kim dalam bukunya Komunikasi Antarbudaya, manusia antarbudaya adalah orang yang telah mencapai tingkat tinggi dalam proses antarbudaya yang kognisi, afeksi dan perilakunya tidak terbatas, tetapi terus berkembang melewati parameter-parameter psikologis suatu budaya. Ia memiliki kepekaan budaya yang berkaitan erat dengan kemampuan berempati terhadap budaya tersebut. Sementara itu, Adler mengatakan bahwa manusia multibudaya adalah orang yang identitas dan loyalitasnya melewati batas-batas kebangsaan dan yang komitmennya bertaut dengan suatu pandangan bahwa dunia ini adalah suatu komunitas global. Secara intelektual dan emosional terikat kepada kesatuan fundamental semua manusia pada saat yang sama mengakui, menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan mendasar antara orang-orang yang berbeda budaya.

Betapa pentingnya pendekatan antarbudaya dalam penerapan kebijakan Perda K3 oleh pemerintah kota Bandung. Manusia sangat berperan untuk mengurangi kesalahpahaman antara orang-orang berbedabudaya. Dalam sistem pemerintahan manusia berada di level utama untuk mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, menjadi manusia antarbudaya dalam konteks penyelesaian masalah kritikan terhadap Perda K3, adalah solusi yang semestinya dilakukan. Pemerintah kota sebagai pembuat kebijakan dapat menjadi penengah antara subkultur masyarakat sopir angkot yang memiliki keanekaragaman

budaya. Diantara upaya yang dapat dilakukan adalah, mencoba untuk empati, mempelajari serta mengidentifikasi interaksi yang telah dilakukan, sehingga dapat menentukan kesalahan atau kekeliruan yang terjadi dan bagaimana agar kesalahan tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan.

3.2. Konflik Subkultur Kelompok Sopir Angkot Perspektif *Standpoint Theory*

Standpoint theory secara hakikatnya membahas tentang kelompok yang dinilai termarginalkan oleh kekuasaan atau struktural yang mendominasi dalam komunikasi multikultur. Kelompok yang dimaksud dalam teori ini adalah kelompok atau komunitas sopir angkot. Mereka merasa adanya ketidakadilan terhadap perilaku yang diterima. Adanya fenomena bahwa para sopir angkot tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Hampir semua lini, seringkali keinginan dan keberadaan kelompok tersebut belum terakomodir. Hal ini yang mendorong kelompok sopir angkot bangkit dan menuntut hak keadilan yang disesuaikan dengan kemampuan mereka.

Griffin (2000:447) menjelaskan tentang pendapat dari Sandra Harding dan Julia T Wood tentang gagasan mereka tentang metode terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia adalah dengan mengawali penyelidikan atas rasa keingintahuan (*inquiry*) dari *standpoint* dan kelompok-kelompok lain yang selama ini termarginalisasi di masyarakat. Menurut Sandra dan T Wood, *standpoint* adalah satu tempat dimana kita melihat dunia sekitar kita. Apapun tempat yang memberikan keuntungan bagi kita, lokasinya akan cenderung menjadikan kita fokus pada lanscap alam maupun sosial tertentu dan bersamaan dengan itu kita mengabaikan

lanscap alam maupun sosial lainnya. *Standpoint* dapat pula diartikan sebagai *viewpoint, perspective, outlook* dan *position*. Setiap penggunaan istilah tersebut, biasanya merujuk pada lokasi tertentu dimana dalam waktu dan ruang observasi dilakukan dan semua berkaitan dengan perilaku dan nilai-nilai. Dengan demikian, *standpoint* kita memiliki pengaruh dan implikasi pada pandangan kita tentang dunia atau *worldview*.

Standpoint, pada hakikatnya mempertegas bahwa ketika orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, dianggap memiliki pandangan yang lebih obyektif daripada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Demikian pula yang dirasakan oleh para sopir angkot. Mereka meyakini bahwa pemerintah kota Bandung menerapkan aturan secara prontal, menyamaratakan antara angkot dengan kendaraan pribadi. Ketidakadilan yang dirasakan mendorong mereka bersikap dengan menyampaikan kritikan terhadap kebijakan tersebut. *Standpoint Theory* memberikan titik awal untuk pemahaman mengenai beberapa dinamika yang dialami setiap individu.

Standpoint Theory memberikan kerangka untuk memahami sistem kekuasaan. Kerangka ini dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka mengakui bahwa setiap individu adalah konsumen aktif dari realitas mereka sendiri dan bahwa perspektif individu merupakan sumber informasi yang paling penting mengenai pengalaman mereka. Turner dalam Riger (2008:178). *Standpoint Theory* atau teori sikap memberikan wewenang pada suara pribadi individu. *Standpoint Theory* mengklaim bahwa pengalaman, pengetahuan dan perilaku komunikasi orang dibentuk sebagian besar oleh kelompok sosial dimana tempat mereka bergabung.

Kritikan kelompok sopir angkot dan komunitas pengguna angkot merupakan bentuk dari sikap terhadap kebijakan yang dinilai didominasi oleh kelompok yang memiliki kekuasaan. Menurut *standpoint theory* atau teori sikap, kritikan tersebut sangat wajar karena konflik memang seringkali dimediasi oleh sikap penolakan atau kritikan. Kehidupan material atau posisi kelas menyusun dan membatasi pemahaman akan hubungan sosial kelompok sopir angkot dengan masyarakat pada umumnya. Artinya bahwa lokasi individu dalam struktur kelas akan membentuk dan membatasi pemahaman sopir akan hubungan sosial para sopir angkot.

4. Kesimpulan

Semoga dengan menempatkan diri sebagai individu antarbudaya dapat menjadi solusi tepat mewujudkan kota Bandung yang aman, bersih dan nyaman sesuai dengan Perda K3. Langkah ini juga mempermudah pekerjaan untuk merubah perilaku masyarakat kota Bandung khususnya para kelompok subkultur yaitu para sopir angkot. Selain itu, menjadi manusia antarbudaya biasanya dapat lebih empati sehingga kesalahan teknis dalam penempatan tong sampah dan jenis tong sampah pada angkutan umum dapat dikaji kembali agar kehadiran tong sampah justru tidak menambah masyarakat penumpang angkot menjadi lebih tidak nyaman sehingga enggan menggunakan angkot.

Cara berkomunikasi yang efektif dalam situasi antar budaya, identitas budaya yang diakui seseorang serta gaya komunikasinya harus sesuai dengan identitas dan gaya yang ditampilkan pada lawan bicaranya. Komunikasi antar budaya dalam pendekatan terhadap masyarakat subkultur diperlukan upaya fleksibel dan dinamis.

Daftar Pustaka

- Endraswara, Suwardi. Pujiharto. Taum dkk. 2013. *Folklor dan Folklife Kesatuan dan Keberagaman. Proceeding Congress of Asian Folklore*. Jogjakarta: Ombak.
- Griffin, 2006. *A First Look At Communication Theory, Sixth Edition*. USA: McGraw Hill International.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*; Bandung: Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2009. *Komunikasi Antarbudaya; Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Rosdakarya.
- Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism; Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Jogjakarta: Kanisius.
- Samovar, A.Larry. Porter, E Richard. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya; Communication Between Cultures*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Spradley, James. 2007. *Metode Etnografi*. Jogjakarta: Tiara Wacana
- Turner, Lynn, West, Richard. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

